



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi perlu melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

b. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilaksanakan secara terukur, terintegrasi dan konsisten;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengamanatkan Pemerintah Daerah harus melakukan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023 – 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu ((Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun rencana secara rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.
6. Reformasi Birokrasi General adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
7. Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
8. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi (*leading institution*) adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi general.
9. Penanggungjawab sektor (*leading sector*) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Sistematika dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023 – 2024 sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu;
 - c. BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu;
 - d. BAB IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu;
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi:
 - a. susunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General; dan
 - b. susunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diatas, merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b diatas, merupakan strategi

pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.

- (4) Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, akan disusun Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Guna memastikan seluruh capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana, maka setiap tahun disusun dan ditetapkan Rencana Aksi/ Pembangunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b diatas, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Tema Sasaran dan Indikator dan target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi general dan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan dalam pelaksanaan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 29 Desember 2023
GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal, 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,


HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN
2023-2024

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, bahwa tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bagidalam tiga periode yaitu Periode ke I Tahun 2010-2014, Periode ke II tahun 2015-2019, dan Periode ke III Tahun 2020-2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, tujuan Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya, mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan (*road map*) yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu tahun 2023-2026 berfokus pada tujuan dan sasaran, arah/kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi diantaranya :

1. Mempercepat tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.
2. Mendapatkan *road map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.
3. Mendapatkan *road map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu 2023-2026 dilakukan untuk mengurangi *silos* (*fragmented*) antar Perangkat Daerah.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2026 memecah isu strategis Reformasi Birokrasi kepada 2 (tingkat) isu yaitu Tingkat Hulu dan Hilir. Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang belum kolaboratif.
2. Transformasi digital yang belum optimal.
3. Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas.
4. Integritas penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi kendala.
5. Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.
2. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi.
3. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik.
4. Dampak inflasi yang tidak terkendali.
5. Pengendalian angka stunting
6. Kesadaran dan Pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu dengan RPJMD Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2026 memiliki *tagline* **Bengkulu Maju, Hebat dan Sejahtera**.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI PROVINSI BENGKULU

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelum ditetapkan Permenpan Nomor 03 tahun 202 tentang Road Map RB Nasional 2022-2024, pelaksanaannya mempedomani Permenpan Nomor : 25 tahun 2020 tentang Roadmap RB Nasional tahun 2020-2024 yang berorientasi pada area-area perubahan yaitu :

- 1) Area Perubahan;
- 2) Area Ketatalaksanaan;
- 3) Area Manajemen SDM;
- 4) Area Organisasi dan Kelembagaan;
- 5) Area Akuntabilitas;
- 6) Area Peningkatan Pelayanan Publik;
- 7) Area Penataan Hukum dan Perundang-undangan;
- 8) Area Pengawasan.

Berdasarkan area-area tersebut merupakan komponen pengungkit perubahan dilakukan evaluasi pelaksanaannya oleh Kemenpan RB untuk mengukur sejauhmana keberhasilan dan menemukan hambatan serta tantangannya. Selanjutnya atas evaluasi tersebut akan menghasilkan indeks reformasi birokrasi pemerintah. Indeks reformasi birokrasi Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bila pada tahun 2021 indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Bengkulu pada angka 63,61 maka pada tahun 2022 pada angka 65,00 masuk kategori "B". Peningkatan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu tersebut, dapat tergambar dalam komponen yaitu Komponen Pengungkit dan Hasil, Komponen Antara dan komponen Hasil, sebagai berikut:

1. Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil,

No	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	10,88	11,69
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,05	6,68
	III. Reform	30,00	14,80	15,96
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,73	34,33
B	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,83	7,89
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,46	8,85
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,04	7,88
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,55	6,05
	Total Komponen Hasil	40,00	31,88	30,67
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	63,61	65,00

2. Hasil Antara

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022
1	Sistem Merit	0-400	-	134,00
2	ASN Yang Profesional	0-100	31,16	41,44
3	Implementasi SPBE	0-5	2,79	3,11
4	Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0-100	55,22	71,60
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,37	4,40
6	Maturitas SPIP	0-5	2	3
7	Kapabilitas APIP	0-5	3	3
8	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	91,91	80,20
9	Kualitas Pengelolaan ARSIP	0-100	58,16	74,70
10	Reformasi Hukum	0-100	-	58,10

3. Komponen Hasil :

No	Komponen Hasil Tahun 2022	Skala	Nilai
1	Opini BPK	Opini	WTP
2	Nilai SAKIP	0-100	69,30
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	88,50
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPKP)	0-100	78,80
5	Survei Internal Organisasi	0-100	68,35

B. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu

Berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) Nasional tahun 2022-2024 bahwa terjadi akselerasi Tujuan dari RB yaitu Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik, maka Isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu diidentifikasi menyesuaikan Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2023. Selanjutnya Isu strategis Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu terbagi kedalam dua isu yaitu:

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu (General)

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- 1) Birokrasi yang belum kolaboratif, peran yang *silo* masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- 2) Belum optimal dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan Reformasi Birokrasi berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik. BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir (Dampak/Tematik)

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul

apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Angka Kemiskinan yang masih tinggi

Pemerintah menghimbau agar dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui program pengentasan kemiskinan dilakukan secara bersama-sama. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh dalam pelaksanaannya. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik. Hal ini masih terlihat bahwa komoditi makanan memiliki peranan besar pada Garis Kemiskinan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, sehingga Provinsi Bengkulu merupakan urutan kedua dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi setelah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

3) Digitalisasi administrasi pemerintah

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptif, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi

pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

5) Angka Stunting

Selain isu Reformasi Birokrasi nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu terdapat permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Walaupun dari sisi capaian indeks Reformasi Birokrasi angka stunting telah mengalami penurunan, namun masih harus perlu keseriusan dan penanganan sistemis berjenjang dari semua pemangku kepentingan yang dibangun dengan sistem regulasi untuk menurunkan angka stunting.

6) Penggunaan Barang Dalam Negeri

Selain isu Reformasi Birokrasi nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu terdapat permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu penggunaan barang dalam negeri. Walaupun persentase penggunaan dalam negeri di Provinsi Bengkulu cukup tinggi yaitu sekitar 80%, namun sistem tata kelola pengadaan barang dan jasa belum terwujud dengan baik. Hal ini mengakibatkan masih kurangnya kolaborasi antara pihak-pihak terkait dalam mewujudkan penggunaan barang dalam negeri yang tinggi.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI PROVINSI BENGKULU

Isu strategis reformasi birokrasi menjadi dasar dalam menentukan agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah provinsi Bengkulu, selanjutnya agenda reformasi birokrasi pemerintah provinsi Bengkulu tahun 2023-2024 terbagi menjadi dua fokus yaitu Refomasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang diuraikan berdasarkan sasaran yang akan dicapai :

I. Reformasi Birokrasi General

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.

A. Sasaran Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu

Sasaran Reformasi Birokrasi General di Provinsi Bengkulu mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam PerMenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, adapun sasaran:

- (1) Sasaran Utama 1, Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, terdiri dari sasaran pendukung ;
 - a) Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Organisasi
 - b) Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN dengan baik
 - c) Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional
 - d) Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi

informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

- e) Terbangunnya Pelayanan Publik Digital
 - f) Meningkatnya Kualitas Pengawasan
 - g) Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi
 - h) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral
 - i) Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Sasaran Utama 2, Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional, terdiri dari sasaran pendukung ;
- a) Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional
 - b) Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien
 - c) Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN
 - d) Terwujudnya rekrutment pegawai ASN yang efektif dan efisien
 - e) Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN
 - f) Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja.
 - g) Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN

B. Arah/Kegiatan Utama dan penanggungjawab Reformasi General

Dalam menunjang pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi dipetakan arah kegiatan utama, serta indikator sebagai ukuran keberhasilan RB pada setiap sasarnya, sebagaimana tabel sbb :

No	Sasaran	Arah/Kegiatan Utama	Indikator
SS. 1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang lincah, kolaboratif dan akuntabel		
1	Terimplementasikan Kebijakan Penyederhanaan Organisasi	Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
2	Terimplementasikan Kebijakan Sistem Kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN dengan baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai
3	Terimplementasikan Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE
			Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*
4	Terimplementasikan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan
			Nilai SAKIP:

		arsip statis	perservasi dan akses arsip statis
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan
		Penguatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah	Opini BPK
			Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
SS, 2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional		
1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional
2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta
3	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN		
4	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN

5	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit
		Peningkatan profesionalitas ASN	Indeks Profesional ASN
		Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*
			Employeer Branding*

C. Penanggungjawab Sasaran Reformasi General

No.	SASARAN RB,	Indikator Kinerja Sasaran	Organisasi Penanggungjawab
	Terciptanya Tatakelola Pemerintahan yang lincah, kolaboratif dan akuntabel		
1.	Sasaran, Terimplementasikan nya Kebijakan Penyederhanaan Organisasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Biro Organisasi Bag. Kelembagaan
2.	Sasaran, Terimplementasikan nya Kebijakan Sistem Kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN dengan baik	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Biro Organisasi Kabag Kelembagaan
3.	Sasaran, Terimplementasikan nya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	Kadis Kominfo Bidang Penyelenggara E Government
4.	Sasaran, Terimplementasikan	Indeks Perencanaan Pembangunan	Bappeda

	nya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Nilai SAKIP	Biro Organisasi Bidang RB dan Akuntabilitas
5.	Sasaran, Terbangunnya Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	DPMPTSP,
6.	Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Inspektorat, urban investigasi Sekretariat MCP
		Tingkat Maturitas SPIP	
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	
7.	Sasaran, Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Indeks Kualitas Kebijakan	Biro Hukum
		Indeks Reformasi Hukum	
8.	Sasaran, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Tingkat Digitalisasi Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Sasaran, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo Bidang Statistik

	arsip digital dan data statistik sektoral		
9.	Sasaran, Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Biro Pembangunan
		Opini BPK	BPKD Bid. Perbend dan Akuntansi
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	BPKD Bid. Perbend dan Akuntansi BPKD, Kasub Akuntansi Dan Pelaporan
Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang profesional			
1.	Sasaran, Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah
2.	Sasaran, Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	BPSDM
3.	Sasaran, Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN		BKD
4.	Sasaran, Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja.	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	BKD

5.	Sasaran, Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	BKD
		Indeks profesional ASN	BKD
		Indeks Berakhlak*	Biro Organisasi
		Employeer Branding*	Biro Organisasi

D. Strategi dan arah kebijakan Pencapaian Sasaran Reformasi General

SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang lincah, kolaboratif dan akuntabel

1. Sasaran, Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Organisasi

Strategi.

- a) Fasilitasi penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dengan Penyederhanaan Struktur Organisasi PD
- b) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dengan Penerbitan Pergub tentang Struktur Organisasi
- c) Pembinaan Jabatan Fungsional dengan Pelantikan Pejabat Fungsional Penyetaraan dari jabatan administrasi
- d) Pengelolaan Promosi ASN dengan Pengukuhan/ Pelantikan Pejabat Pimpinan tinggi dan pejabat Administrasi

2. Sasaran, Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN dengan baik

Strategi,

- a) Asistensi Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Sosialisasi Permenpan RB No 07 th 2022 tentang Sistem Kerja Baru 2024
- b) Penilaian Kinerja (BKD) dengan Penilaian Kinerja terhadap ASN

3. Sasaran, Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional

Strategi,

- a) Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik dengan Pembuatan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE
- b) Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dengan Peningkatan nilai indeks SPBE
- c) Pengelolaan Ketatalaksanaan pemerintahan 2024-2026 dengan pengelolaan tatalaksana pemerintahan

4. Sasaran, Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Strategi,

- a) Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan peningkatan kualitas perencanaan kinerja
- b) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- c) Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah provinsi

5. Sasaran, Terbangunnya Pelayanan Publik Digital

Strategi,

- a) Fasilitasi penataan Pelayanan Publik dengan pembinaan pelayanan publik digital

- b) Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan Tersedianya pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik

6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Strategi,

- a) Penyelenggaraan pengawasan Internal dengan
- b) Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
- c) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- d) Pendampingan dan asistensi

7. Sasaran, Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi

Strategi,

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dengan Penerbitan Pergub tentang Struktur Organisasi

8. Sasaran, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral

Strategi,

- a) Akusisi, Pengolahan, preservasi dan akses arsip statis dengan Akusisi, Pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral dengan tersedianya data Statistik Sektoral
- c) Pembangunan metadata statistik sektoral dengan Pelatihan Pembuatan metadata data Statistik sektoral

9. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral

Strategi,

- a) Penyusunan Standar Satuan Harga
- b) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Umum
- c) Standar Satuan Harga ke PUan

SS.2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

1. Sasaran, Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional

Strategi,

- a) Fasilitasi Kelembagaan Provinsi (Organisasi) dengan Pengusulan perubahan jabatan struktural ke Jabatan Fungsional
- b) Pengangkatan dalam jabatan fungsional dengan Mutasi dalam jabatan

2. Sasaran, Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien

Strategi,

- a) Pengembangan Kompetensi teknis
- b) Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi, manajerial dan fungsional

3. Sasaran, Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN

Strategi,

- a)

4. Sasaran, Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien

Strategi,

- a) Penataan Analisis Jabatan dengan Penyusunan dokumen Anjab
- b) Penyusunan kebutuhan ASN berdasar Anjab ABK dengan penyusunan Dokumen rencana kebutuhan
- c) Pelaksanaan Seleksi CASN dengan sistem CAT

5. Sasaran, Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN

Strategi,

- a) Pengembangan Sistem Kepegawaian Elektronik dengan Layanan administrasi kepegawaian
- b) Digitalisasi Arsip Kepegawaian
- c) Pemanfaatan email pemerintahan (kominfo)
- d) Operasionalisasi jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah dengan Tandatangan Elektronik

6. Sasaran, Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja.

Strategi,

Penyusunan Regulasi TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dengan Penyusunan Peraturan Gubernur

7. Sasaran, Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN

- a) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja

- b) Fasilitasi peningkatan pelayanan publik dengan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayan terpadu perizinan dan non perizinan.

E. SASARAN KINERJA DAN TARGET 2023-2026

No	SASARAN RB	Indikator Kinerja Sasaran	BASE LINE	TARGET	
			2022	2023	2024
I.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang lincah, kolaboratif dan akuntabel				
1	Terimplementasikan nya Kebijakan Penyederhanaan Organisasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100%
2	Terimplementasikan nya Kebijakan Sistem Kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN dengan baik	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	na	40%	80%
3	Terimplementasikan nya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,1	3,19	3,33
4	Terimplementasikan nya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang terintegrasi, berbasis IT yang mendorong peningkatan AKIP	Indeks Perencanaan Pembangunan	22,28	30	30
		Nilai SAKIP	69,30	70	70

5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	0 MPP Kab/ Kota	0 MPP Kab/ Kota	1 MPP Kab/ Kota
6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	3 OPD	1 OPD	3 OPD
		Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	4 laporan	4 laporan	2 Kesepakatan
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	78,8	80	80
7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	N/A	N/A
		Indeks Reformasi Hukum	8 perda	8 perda	15 perda
8	Meningkatnya kualitas Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektor	Tingkat Digitalisasi Arsip	7514 Lembar	7614 Lembar	7714 Lembar
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	100%	100%
9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	70,00	25,07	72%
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK			

II. Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional					
1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100%	100%	100%
2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	39 Orang	30 Orang	30 Orang
3	Sasaran, Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN				
4	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja.	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	134	175	251
		Indeks profesional ASN	70	73	75
		Indeks Berakhlak*	59,1	65	75
		Employeer Branding*	3 OPD	Min 10 OPD	Seluruh OPD

F. Reformasi Birokrasi Tematik di Provinsi Bengkulu

Dalam rangka mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan tema Reformasi Birokrasi tematik di Provinsi Bengkulu. Sejalan dengan PerMenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 Reformasi Birokrasi Tematik di Provinsi Bengkulu difokuskan pada:

- a. Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Peningkatan Investasi;
- c. Pengendalian Inflasi;
- d. Digitalisasi Pemerintahan;
- e. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- f. Penurunan Angka Stunting

Adapun Tema dan Sasaran, Indikator dan target Reformasi Birokrasi tematik Provinsi Bengkulu 2023-2026 terlihat pada tabel berikut:

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Penanggungjawab
1.	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	BAPEDA (TKPKD)
2.	Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi	DPMPTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
3.	Pengendalian Inflasi	Stabilitas Inflasi	Tingkat Inflasi	Biro Adm Perekonomian
4.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Indeks E Government	Dinas Kominfo
5.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan barang dalam negeri	Mencintai dan menggunakan Produk Dalam Negeri sendiri yang sudah berkualitas nasional	Biro Administrasi Pembangunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.	Penurunan Angka Stunting	Menurunnya angka Stunting	Angka Stunting	Dinas Kesehatan

Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi Reformasi Birokrasi Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI PROVINSI BENGKULU BENGKULU

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. *Framework* Implementasi Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu

Arah Kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu difokuskan untuk memperbaiki Reformasi Birokrasi dan manajemen tata kelola pemerintahan (*Reformasi Birokrasi General*) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (*Reformasi Birokrasi Tematik*). Percepatan Reformasi Birokrasi kepada agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan Reformasi Birokrasi tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bengkulu

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu, baik Reformasi Birokrasi general maupun Reformasi Birokrasi tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pengelola Reformasi Birokrasi dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup proporsional yang dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengampu, maka dalam Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Bengkulu 2023-2024 pengelola Reformasi Birokrasi di level Pemerintah Daerah akan disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.

a) *Strategic Transformation Unit* (STU)

STU adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

- b) Penanggungjawab Pengampu (*leading institution*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General.

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi general yang telah ditetapkan dalam road map Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

- c) Koordinator Pengampu (*leading sector*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik baik di lingkup pemerintah provinsi Bengkulu. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong Reformasi Birokrasi berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di level instansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu dilaksanakan oleh STU.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal).

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN
 2023-2024

**TEMA, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET
 REFORMASI BIROKRASI GENERAL PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2024**

No.	SASARAN RB, PROGRAM DAN KEGIATAN	Arah / Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan	BASE LINE	TARGET		PENANGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
I.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang lincah, Kolaboratif dan Akuntabel						
1	Sasaran, Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Organisasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) /transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100%	Kabag Kelembagaan Biro Organisasi, Biro Hukum, BKD
1)	Kegiatan Fasilitasi penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Pennyederhanaan Struktur Organisasi PD	Persentase struktur organisasi PD yang disederhanakan 2022	100%	100%	100%	Biro Organisasi
2)	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Penerbitan Pergub Tentang Struktur Organisasi	Jumlah Produk Hukum Pengaturan Yang disusun (Perda dan Pergub yang Disusun)	8 Perda 30 Pergub	8 Perda 30 Pergub	15 Perda 80 Pergub	Biro Hukum (Bag, Penyusunan Per UU Prov.)
3)	Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional	Peningkatan pemahaman terhadap jabatan fungsional	Pelantikan Pejabat Fungsional Penyetaraan dari Jabatan Administrasi	604 orang (100%)	--	--	BKD
			Jumlah Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan yang Diberi Pemahaman	604 orang (100%)	--	--	BKD

4)	Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Pengukuhan/Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi	Jumlah Pejabat Struktural Yang di Kukuhkan Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi		100% tahun 2023		BKD
2	Sasaran, Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN dengan baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	na	1 Pergub 40 %	80%	Kabag Kelembagaan /Tatalaksana, BKD
1)	Kegiatan Penilaian Kinerja (BKD)	Penilaian Kinerja terhadap ASN	Jumlah ASN yang dilakukan penilaian	10306 ASN	10306 ASN	10306 ASN	BKD
3	Sasaran, Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,1	3,19	3,33	Dinas Kominfo Kabid Penyelenggaraan E-Government dan Sobkoor Tata Kelola E-Government
			Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	-	1 Dokumen / 5 tahun sekali	-	
	1. Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pembuatan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		1 Dokmen	1 Dokmen	
	2. Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Indeks SPBE	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

4	Sasaran, Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	22,28	30	30	Bappeda, BPKD, Inspektorat, biro Pembangunan, biro Organisasi dan Seluruh PD
			Nilai SAKIP	69,3	70	70	Biro Organisasi
1)	program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	nilai perencanaan Kinerja	22,28	30	30	Bappeda
2)	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Sinkronisasi, Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Target Indikator Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD yang Tercapai	100%	100%	100%	Bappeda
3)	Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemda bid Keuada Pemprov	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan berbasis online	Jumlah Peserta Sosialisasi	41 OPD	41 OPD	41 OPD	Kabid Anggaran BPKD
5	Sasaran, Terbangunnya Pelayanan Publik Digital	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	0	0	1	DPMPTSP, Kabag Tatalaksana, Diskominfotik, DPMPSP, Samsat, seluruh PD
				MPP	MPP	MPP	
				Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	
1)	Kegiatan Fasilitasi penataan Pelayanan Publik	Melakukan pembinaan pelayanan publik	Jumlah unit pelayanan publik yang dilakukan pembinaan	5 uppp	5 uppp	10 uppp	Biro Organisasi
				di lingkup Prov, Kab/Kota	di lingkup Prov, Kab/Kota	di lingkup Prov, Kab/Kota	

2)	Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Tersedianya pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik	100%	100%	100%	DPMPPTSP	
6	Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	3 OPD	1 OPD	3 OPD	Inspektorat, irban investigasi Sekretariat MCP	
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3		
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	4 laporan	4 laporan	2 Kesepakatan		
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	78,8	80	80		
1)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Persentase OPD yang di lakukan pemeriksaan, revie, monitoring dan Evaluasi	1. jumlah laporan evaluasi	50 LHE	34%	50 LHE	Inspektorat, irban investigasi Sekretariat MCP	
		2. persentase pengaduan masyarakat/laporan/limpahan dari pemerintah pusat yang dilakukan pemeriksaan	2. Persentase Penanganan pengaduan secara elektronik (E-dumas) yang diselesaikan	70%	80%	80%		
			3. Persentase tindaklanjut hasil Pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi	65%	68%	69%		
			4. Jumlah OPD yang dilakukan Pemeriksaan, reviu, monitoring dan evaluasi	34 OPD	-	34 OPD		
			1. Persentase OPD yang di lakukan pemeriksaan revie, monitoring dan Evaluasi	Persentasi Tindaklanjut laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Infestigasi	80%	80%		83%
			2. Persentase Pengaduan Masyarakat/laporan/ Limpahan dari Pemerintah Pusat yang dilakukan Pemeriksaan	Laporan Hasil Pengaaduan	20 Laporan	33 Laporan		35 Laporan

3)	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Nilai monitoring center of prevention (MCP)	1. Persentase Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	
		2. Nilai strategi nasional pencegahan korupsi (satranas PK)	2. Pesentase OPD yang nilai yang Matoritas SPIP Minimal Level 2	75%	75%	75%	
		3. Tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP)	3. Persentase Pemenuhan Eleman IACM (Internal Audit Capability Model)	100%	100%	100%	
		4. Tingkat Kepatuhan ASN / Penyelenggara Negara	4. Jumlah Laporan Hasil Tingka t Kepatuhan ASN	100%	100%	100%	
		5. Tingkat Matoritas Sistem Pengendalian Inten Pemerinah (SPIP)		Level 3	Level 3	Level 3	
4)	Pendampingan dan Asistensi	1. Nilai monitoring center of prevention (MCP)	1. Persentase ASN E+D55sesslon IV yang mengisi LHKASN	100%	100%	100%	
		2. Nilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Satranas PK)	2. Pesentase ASN Penyelenggara Negara yang mengisi LHKPN	100%	100%	100%	
		3. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3. Persentase OPD yang dilakukan Evaluasi yang Dilakukan Evaluasi PMPRB	50%	55%	60%	
		4. Tingkat Kepatuhan ASN / Penyelenggara Negara	4. Persentase OPD yang Menyusun Risk Register	50%	60%	75%	
		5. Tingkat Matoritas Sistem Pengendalian Inten Pemerinah (SPIP)	5. Persentase Pemenuhan Elemen MCP	80%	85%	90%	
			6. Persentase Pemenuhan Elemen Stranas PK	80%	85%	90%	
7	Sasaran, Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	N/A	N/A	Biro Hukum dan seluruh PD
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	8 perda	8 perda	15 perda	

1)	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Penerbitan Pergub tentang Struktur Organisasi	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun	30	30	80	Biro Hukum
8	Sasaran, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	7514 Lembar	7614 Lembar	7714 Lembar	Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Kepala Bidang pengelolaan Kearsipan dan subkoor Akusisi, pengelolaan dan preservasi
							Dinas Perpustakaan dan Arsip
1)	Kegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akusisi, pengolahan perservasi dan akses arsip statis	7514 Lembar	7614 Lembar	7714 Lembar	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Sasaran, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	58,53%	100%	Kominfo
1)	Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral	Jumlah Dukumen Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	1	1	kabid statistik dan persandian dan subkoor statistik Diskominfo
				Dokumen	Dokumen	Dokumen	
2)	Kegiatan Pembangunan metadata statistik sektoral	Pelatihan Pembuatan metadata data Statistik sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang di himpun	-	1	1	kabid statistik dan persandian dan subkoor statistik Diskominfo
					Dokumen	Dokumen	
9	Sasaran, Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	70,00	25,07	72%	BPKD, Inspektorat, Biro Pembangunan, seluruh PD
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Kabid Perbend dan Akuntansi BPKD, Kasub Akuntansi Dan Pelaporan

			Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	47,83 %	70 %	75 %	Kabid Perbend dan Akuntansi BPKD, Kasub Akuntansi Dan Pelaporan
II.	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional						
1	Sasaran, Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, seluruh PD
1)	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Provinsi (Organisasi)	Pengusulan perubahan jabatan struktural ke JF	Jumlah jabatan yang dialihkan	607	607	607	
2)	Kegiatan Pengangkatan dalam jabatan fungsional	Mutasi dalam jabatan	Jumlah jabatan yang sdh dilantik	604 PNS (90 %)	100%	100%	
2	Sasaran, Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	39 orang	30 orang	30 orang	BPSDM
1)	Kegiatan Pengembangan Kompetensi teknis	Pengembangan Kompetensi teknis pengelola barang dan jasa pemerintah	Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi teknis pengelola barang dan jasa pemerintah	39 orang	30 orang	30 orang	BPSDM
2)	Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi, manajerial dan fungsional	1. Sertifikasi kelembagaan dan program	Nilai akreditasi lembaga dan program	-	1. Nilai akreditasi Lembaga B (81,026), 2. Nilai akreditasi program (a. Latsar B (81,028), b.. PKA C(76,961), c. PKP C(76,260)		BPSDM
		2. Pengembangan Kompetensi Manajerial Umum dan Fungsional	Persentase yang mengikuti kompetensi manajerial umum dan fungsional	390 Orang	400 Orang	250 Orang	BKD
1)	Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Penyusunan dok Anjab	Jumlah PD yang dilakukan Anjab	38	38	38	Biro Organisasi
2)	Kegiatan Penyusunan kebutuhan ASN berdasar Anjab ABK	Dokumen rencana kebutuhan	Persentase pemenuhan perhitungan pegawai berdasar Anjab ABK	100%	100%	100%	Biro Organisasi

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2024

**TEMA, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET
 REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2024**

No	TEMA	SASARAN/KEGIATAN	Indikator Kinerja/Outcome/ Output	CAPAIAN EXISTING TAHUN 2022		PROYEKSI TARGET DAERAH		KET
				Nasional	Prov. Bengkulu	2023	2024	
1	Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan umum	Angka Kemiskinan	9,57	14,34	14 – 14,5	13,5 – 14	Bappeda Provinsi Bengkulu
		Menurunnya angka kemiskinan ekstrim	Angka Kemiskinan Ekstrim	2,04	3,61	1,4	0,4	
		Kegiatan :						PD Terkait :
		1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,1	70,1	70,1	70,1	Dinas Kesehatan
		2. Meningkatnya Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani	71,2	71,2	71,2	71,2	2. Dinas Sosial

		3. Peningkatan Penanganan Rumah dan Pemukiman Layak Huni Dikawasan Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Ditangani	47	47	47	47	3. Dinas PUPR
2	Stunting	Menurunnya Angka Stunting	Angka Stunting	21,6	19,8	14	14	Dinas Kesehatan
		Kegiatan :	Berkurangnya dan menurunnya angka Stunting Provinsi Bengkulu dan Nasional					PD Terkait :
		Pengelolaan Gizi Masyarakat						1. BKKBN
		Kesehatan Ibu dan Anak						2. BAPPEDA
		Imunisasi						3. Seluruh OPD
		Kesehatan Lingkungan						
3	Penggunaan Barang Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan barang dlm negeri	Mencintai dan menggunakan produk dalam Negeri Sendiri yang sudah berkualitas Nasional			80-90%	80-90%	1. Biro Adm Pembangunan
								2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

		Kegiatan :	Menstabilisasikan harga pasar dan kebutuhan masyarakat					PD Terkait :
		1. Program Peningkatan Sarana Distribusi						Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						
		3. Program Pengembangan Ekspor						
		4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen						
		5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi						
4	Inflasi	Stabilitas Inflasi	Tingkat Inflasi	3 ± 1 %	3 ± 1 %	3 ± 1 %	3 ± 1 %	Biro Adm Ekonomi Setda Prov. Bengkulu
		1. Operasi Pasar/pasar murah (Pasar murah, Sidak Pasar)	Jumlah operasi pasar	situasional	situasiona	situasiona	situasiona	Disperindag
		2. Rakor Pengendalian Inflasi (Untuk mengetahui Pembahasan Pengendalian Inflasi di Provinsi Bengkulu)		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Biro Ekonomi

		15. Sidak Pasar Terkait Kelangkaan Barang yang dapat menyumbang andil Inflasi yang Besar						Satgas Pangan
		16. Rilis Inflasi Bulanan						BPS
		17. Masalah Anggaran OPD yang Terkait Pengendalian Inflasi						BPKD
5	Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	1.200 Triliun	7,7 Triliun	8 Triliun	8,3 Triliun	DPMPTSP Provinsi Bengkulu
		Kegiatan :						PD Terkait :
		1. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yg dilakukan pemantauan/ 15			Pemetaan dan pelaporan para pelaku usaha yg tertib dlm pengisian LKPM (15 pelaku usaha)	Pemetaan dan pelaporan para pelaku usaha yg tertib dlm pengisian LKPM (20 pelaku usaha)	1.Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Prov. Bkl 2.PT. Pelindo II 3.PT. Telkom 4.PT. Angkasa Pura II

							5. Bank Indonesia	
		2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yg dilakukan pengawasan/ 15 pelaku usaha			Pengawasan kpd para pelaku usaha terkait pemenuhan kewajiban perizinan dan LKPM (15 Pelaku usaha)	Pengawasan kpd para pelaku usaha terkait pemenuhan kewajiban perizinan dan LKPM (20 Pelaku usaha)	6. PT. Utama Karya

		3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yg dilakukan bimtek&sosialisasi/315 pelaku usaha			Bimtek dan sosialisasi perizinan dan LKPM serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal kpd para pelaku usaha besar & UMKM (315 pelaku usaha)	Bimtek dan sosialisasi perizinan dan LKPM serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal kpd para pelaku usaha besar & UMKM (340 pelaku usaha)	7.Seluruh OPD
6	Digitalisasi Pemerintahan	Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Indek E Government	2,34	3,11	3,19	3,33	Diskominfotik

	1. Sinkronisasi Penyusunan Rencana Induk SPBE	Pembuatan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerin Komunikasi dan Informasi RI
	2. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Nilai SPBE					DISKOMINFOTIK
	Manajemen Resiko SPBE dan Aplikasi Pengawasan Internal Pemerintah						Inspektorat
	Aplikasi e-ngadu						
	Perencanaan dan Penganggaran		-			-	Bappeda
	Pelayanan Pegawai Aplikasi ARIN dan Ekinerja			-	1 Dokumen / 5 tahun sekali		BKD
	Pembuatan Srikandi						Perpustakaan
	Perizinan						DPMPSTP
	Sistem Informasi Rumah Sakit (Pelayanan Publik)						RSUD
	Aplikasi JDIH						Biro Hukum

		PengadaanBarangdanjasa Aplikasi LPSE					Biro Pembangunan
		ESAKIP dan Peta Proses Bisnis					Biro organisasi
		PenganggaranandaAset					BPKD
		Esamsat					
		SIMDA					

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu



HENDRI DONAN, S.H., M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19750825 200502 1 005

GUBERNUR BENGKULU,
TTD
H. ROHIDIN MERSYAH